# **BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

## **Literature Review**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber literatur yang digunakan sebagai pembanding penelitian yang akan penulis ambil.

Literatur pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Widya Lutfianti Pasha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung. Dengan judul, **“PERAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK DI BANGLADESH.”** Dalam penelitian tersebut, peneliti memaparkan peran yang dilakukan ILO dalam mengatasi permasalahan pekerja anak di Bangladesh. Pada penelitian tersebut, dijelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh ILO adalah dengan melaksanakan kerjasama bernama, *Country Level Engagement Assistant to Reduce Child Labour* (CLEAR) yang merupakan bentuk kerjasama untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang setuju untuk mendapat dukungan dalam mengurangi pekerja anak hingga ke bentuk terburuknya. Bangladesh merupakan salah satu negara yang menyetujui kerjasama ini. Demi melancarkan program ini, ILO juga bekerjasama dengan NGO setempat, asosiasi perusahaan dan kementerian terkait. program ini berlangsung mulai November 2013-Juni 2017. Tujuan dari CLEAR sendiri adalah untuk mendukung adanya eliminasi pekerja anak dengan memperkuat kapasitas pemerintah, otoritas negara, termasuk organisasi pengusaha dan pekerja, juga masyarakat sipil. Langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai tujuan dari kerjasama ini diantaranya adalah perbaikan undang-undang lokal dan nasional terkait standar kerja dan masalah pekerja anak; meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum yang terkait; mendukung pelaksanaan efektif dalam mengembangkan dan menerapkan rencana nasional; memberi rekomendasi tentang pembuatan program sosial yang lebih responsif bagi kebutuhan pekerja anak yang rentang terkena eksploitasi dengan meningkatkan program atau kebijakan lokal maupun nasional seperti mendapat pendidikan dasar, pelatihan, perlindungan sosial, dan perbaikan fasilitas.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Pada literature di atas, penulis mengangkat kerjasama CLEAR sebagai kerjasama inti dalam penelitian yang diambil karena penelitian mencakup tahun 2015-2017, sejalan dengan periode berlangsungnya CLEAR, yang menjadi kesamaan adalah kedua penelitian akan sama-sama membahas mengenai CLEAR. Akan tetapi, yang berbeda adalah pada penulisan ini penulis tidak hanya mengangkat kerjasama CLEAR karena cakupan penelitian berlangsung pada periode 2015-2020. Selain itu, pada literatur diatas, peneliti berfokus kepada pekerja anak secara general bukan spesifik pada sektor industri garmen siap pakai.

Literatur selanjutnya merupakan literatur yang ditulis oleh Siti Fajriah Nursiam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Yang dimuat dalam Global Political Studies Journal berjudul, **“PERANAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) MELALUI INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATING OF CHILD LABOUR (IPEC) DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA.”** Indonesia dan IPEC melakukan kerjasama untuk menanggulangi segala bentuk pekerja anak. IPEC juga bekerjasama dengan kementerian terkait (Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Sosial), Asosiasi Pengusaha Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja, serta organisasi non pemerintah terkait.

Keseriusan Indonesia tercermin dalam ketetapan yang disahkan untuk menangani kasus pekerja anak yang telah lama terjadi di Indonesia. Melalui UU No. 20 Tahun 1999 pengesahan dari Konvensi ILO No 138. Dan Undang-undang No. 1 tahun 2000 yang memberlakukan Konvensi ILO no. 182 mengenai larangan Pekerja Anak dan Penghapusan dengan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

ILO dan Indonesia melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai program penghapusan pekerja anak yang telah berlangsung dari tahun 2000 dan berlangsung hingga 2020. Namun demikian, diantara program kerjasama yang berlangsung, terdapat beberapa program yang terhambat karena kurangnya pendanaan dari ILO. IPEC-Indonesia juga terus berusaha untuk melaksanakan program yang cakupannya dan skala lebih luas di Indonesia, dengan batasan waktu tertentu, dengan target satu sektor tertentu. Upaya penghapusan pekerja anak dekade ini dilakukan dengan advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan kapasitas dan kelembagaan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengembangan pilot (uji coba) di berbagai daerah di berbagai sektor.

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RANPBPTA) saat ini memasuki kurun waktu sepuluh tahun II (2013– 2022) Kerjasamanya berpusat kepada pembangunan masyarakat (*People-centred Development Programme* atau PcDP) dan merupakan kolaborasi antara ILO juga UNDP. Kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan sistematis bagi mata pencaharian, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan usaha mikro di daerah. ILO juga bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (Micro Finance Center of Indonesia) Lembaga Pengembanagn Perbankan Indonesia (LPPI) untuk mengembangkan perekonomian Indonesia.

Persamaan antara penelitian di atas yang membahas mengenai kerjasama ILO dan Indonesia dengan peran ILO di Bangladesh adalah mereka sama-sama berfokus untuk mengatasi pekerja anak dengan meningkatkan sistem pendidikan, memperbaiki sistem hukum dan kebijakan yang ada, sosialisasi terhadap masyarakat, juga memperbaiki dan mengembangkan sistem ekonomi negara menjadi lebih baik. Namun, yang menjadi perbedaan di sini, program kerjasama yang terlaksana di Indonesia bukanlah program ILO yang dibentuk untuk menanggulangi masalah bersama di berbagai negara berkembang. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan ILO merupakan kerjasama yang terbentuk atas kesepakatan dua pihak.

Literatur selanjutnya merupakan penelitian yang ditulis oleh Linn Holmström, Faculty of Law, Lund University, Swedia. Dengan judul, ”***Made By Children- A study of the elimination of child labour in Bangladesh’s textile industry*.”** Penelitian ini berfokus kepada perkembangan hukum yang berlangsung untuk mengatasi isu pekerja anak yang terjadi pada industri tekstil dan berfokus dalam menjawab pertanyaan yang dijadikan tumpuan pada penelitian ini yaitu: apakah kewajiban dan tekanan internasional berdampak pada jumlah pekerja anak serta undang-undang nasional dan tindakan yang dilakukan terhadap pekerja anak di industri garmen di Bangladesh; apakah undang-undang nasional untuk menghapuskan pekerja anak di industri garmen sejalan dengan standar internasional dan cukup memadai untuk menghapus atau secara substansial mengurangi pekerja anak?

Undang-undang merupakan aspek penting dalam mempengaruhi perilaku individu dan mengubah norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dan berperan sebagai aspek kunci jika ingin menghapus masalah mengenai pekerja anak. Jika masyarakat memahami pentingnya hukum, masyarakat cenderung akan mematuhinya. Tetapi, sebaliknya jika masyarakat umum tidak menyetujui undang-undang tersebut, masyarakat tidak akan mematuhinya. Artinya, perlu digaris bawahi jika pentingnya literasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat sehingga mereka dapat melihat hubungan jelas mengapa undang-undang itu diperkenalkan dan dipatuhi. Penegakan hukum merupakan kunci untuk dapat mengubah persepsi masyarakat, yang dalam hal ini menyangkut dengan pekerjaan anak.

Terdapat perkembangan yang signifikan dalam undang-undang nasional Bangladesh bertujuan untuk mengatur kondisi kerja, dan menghapus angka anak yang bekerja. Meskipun demikian, penegakan hukum pekerja anak di sektor garmen berorientasi ekspor memang mengalami kemajuan signifikan, tetapi di luar sektor itu, penegakan hukum masih menjadi tantangan besar, ILO telah menegaskan bahwa prosedur penegakan berada di jalur yang benar, tetapi salah satu perhatian utama adalah hukuman harus diterapkan dalam praktiknya, agar undang-undang tersebut dapat ditegakkan secara efektif.

Tentu saja adopsi dan penegakan undang undang bukanlah hal yang mudah. Pemerintah Bangladesh menaruh perhatian penuh pada pengawasan setelah undang-undang yang dibuat telah diadopsi. Hal ini bertujuan untuk mengintensifkan perlindungan bagi pekerja anak. Namun, masih terjadi kurangnya pengawasan bagi pekerja anak yang bekerja pada unit rumah tangga, atau unit informal.

Bangladesh memang berada di jalur yang tepat untuk mengatasi masalah ini, mengingat tekanan yang didapat dari komunitas dan organisasi internasional, hal ini dapat menjadi alat pacu dan membawanya kepada peningkatan yang signifikan termasuk dalam mengatasi dampaknya di luar sektor formal—industri garmen informal. Dengan menguatnya ekspektasi dan tuntutan tanggung jawab sosial perusahaan agar perusahaan bisa bertanggung jawab atas kondisi kerja dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh rantai pasokan mereka, maka batasan di sektor formal dalam tindakan penghapusan pekerja anak akan meluas ke sektor informal.

Dengan adanya larangan yang tertuang dalam undang-undang nasional. Negara bertanggung jawab atas perlindungan anak. Hukum nasional memberikan landasan bagi “prinsip, tujuan, dan prioritas kebijakan nasional.” Juga menciptakan standar prosedur khusus untuk bertindak.

Negara-negara yang telah menetapkan undang-undang mengenai larangan pekerja anak secara umumnya menerima tekanan dari organisasi internasional, LSM dan pemerintah telah mempengaruhi upaya Negara untuk menghapus pekerja anak dan untuk lebih efektif memperkenalkan program pendidikan, mengadopsi peraturan industri, mengadopsi serangkaian undang-undang, memperkuat penegakan undang-undang dan memantau pencapaian untuk memenuhi standar internasional. Umumnya, kesadaran hukum yang meningkat adalah kunci untuk pengakuan dan praktik legislasi. Tentu pengaruh legislasi tergantung pada aspek, misalnya “sumber daya manusia dan material serta political interest.” Pengaruh yang dihasilkan juga bergantung pada kesadaran dan penerimaan hukum oleh masyarakat. Jika undang-undang tidak diterima atau dipercaya dalam masyarakat umum, masyarakat akan cenderung mengabaikannya. Hal ini juga berpengaruh pada sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Penelitian di atas menyoroti penerapan hukum dan undang-undang yang berlaku mengenai pekerja anak di Bangladesh. Sejalan dengan penelitian di atas, penelitian penulis juga akan menyoroti bagaimana penerapan hukum dan undang-undang berlangsung, akan tetapi karena penelitian di atas ditulis dari sudut pandang hukum, maka akan terdapat beberapa perbedaan. Perbedaannya, penulis bukan hanya menyorot masalah ini dari kacamata hukum, melainkan juga dari sudut pandang internasional, mengenai peran aktif organisasi internasional (dalam hal ini adalah *International Labour Organization*) serta organisasi dan Lembaga terkait.

## **Kerangka Teoritis**

### **Organisasi Internasional**

Organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah yang inklusif. Merupakan fenomena yang berkembang dalam dunia internasional pertama kali sekitar satu abad yang lalu. Secara lebih rinci, definisi Organisasi Internasional dijelaskan dalam buku karya Clive Archer. *The Yearbook of International Organizations* mendefinisikan mendefinisikan organisasi antar pemerintah sebagai, “organisasi yang terdiri dari negara-negara berdaulat, atau organisasi antar pemerintah lainnya. IGO didirikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang bertindak sebagai piagam yang membentuk kelompok.” Definisi ini mencakup secara luas luas namun pada saat yang sama mengecualikan kelompok organisasi tertentu yang mungkin dianggap sebagai IGO.

Wallace dan Singer (1970) membedakan organisasi antar pemerintah ke dalam tiga kriteria:

1. Organisasi ‘setidaknya harus terdiri dari dua anggota negara yang terkualifikasi dalam sistem internasional,’ dan seharusnya ‘dibuat oleh instrument formal antara negara-negara. Organisasi internasional juga masih bagian dari organisasi internasional, karena jika tidak organisasi multilateral tertentu harus dikecualikan ketika periode keanggotaan mereka berkurang menjadi dua.
2. Organisasi harus mengadakan sesi pleno yang teratur dengan interval tidak lebih dari sekali dalam satu dekade.
3. Organisasi harus memiliki sekretariat tetap dengan susunan kerangka kantor pusat yang permanen dalam menjalankan tugasnya.

Plano dan Riggs (1967) memberikan sebelas fitur penting dari lembaga antar pemerintah pada abad kesembilan belas. Ini merupakan bentuk karakteristik dasar dan prosedur organisasi internasional awal yang kemudian berkembang menjadi ciri umum lembaga internasional modern.

Sedangkan Bennett (1977), menjelaskan karakteristik umum organisasi internasional sebagai berikut:

1. Organisasi permanen untuk menjalankan serangkaian fungsi yang berkelanjutan;
2. keanggotaan sukarela dari pihak-pihak yang memenuhi syarat;
3. instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasi;
4. badan konsultatif yang mewakili secara luas;
5. sekretariat tetap untuk menjalankan administrasi, penelitian dan fungsi informasi.

Jadi kesimpulannya, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal yang berkesinambungan, dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota (pemerintah dan/atau non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggota. Faktor-faktor lain sering dikaitkan dengan sebagian besar organisasi internasional: Lembaga biasanya berisi pertemuan pleno dari negara anggota (sering disebut majelis atau konferensi), pertemuan yang lebih teratur dari sejumlah anggota dengan frekuensi yang cukup sering.

1. ***International Labour Organization* (ILO)**

*International Labour Organization* (ILO) merupakan konstitusi yang dirancang pada tahun 1919 oleh Komisi Perpekerjaan, diketuai oleh Samuel Gompers, kepala Federasi pekerja Amerika (AFL) di Amerika Serikat. Satu-satunya konstitusi dari jenisnya yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam badan eksekutifnya. Yang memiliki tujuan untuk mempromosikan hak-hak para pekerja, mendorong dan menciptakan kesempatan kerja yang layak, serta meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog tentang isu-isu yang terkait dengan pekerja dan pekerjaan.

Faktor yang mendorong terbentuknya ILO muncul dari pertimbangan keamanan, kemanusiaan, politik dan ekonomi para pendiri ILO yang mengakui pentingnya keadilan sosial dalam menjamin perdamaian, berlatar belakang eksploitasi pekerja di negara-negara industri pada saat itu. adanya pemahaman mengenai saling ketergantungan ekonomi dunia juga meningkat, maka kerja sama untuk memperoleh jesamaan kondisi di negara-negara yang bersaing dalam pasar.

Berdasarkan ide-ide ini, Pembukaan Konstitusi ILO menyatakan:

* Perdamaian universal dan abadi hanya dapat dibangun jika didasarkan pada keadilan sosial; jika terdapat ketidakadilan, kesulitan, dan kekurangan bagi Sebagian besar orang dalam lingkungan kerja sehingga menimbulkan keresahan dan mengancam kedamaian dunia, maka perbaikan sangat diperlukan.
* Kegagalan suatu negara untuk mengadopsi kondisi kerja yang manusiawi bagi pekerja merupakan hambatan bagi negara untuk memperbaiki kondisi negaranya sendiri.

Dalam menyelesaikan tugasnya, ILO bekerja dengan tiga badan utama yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja:

* *International Labour Conference* menetapkan standar per pekerjaan internasional dan kebijakan luas ILO. Pertemuan untuk kepentingan tersebut diadakan tiap tahun di Jenewa. Konferensi ini sekaligus merupakan forum diskusi tentang masalah-masalah sosial dan per pekerjaan.
* Dewan Eksekutif ILO merupakan Badan Pengurus. Mereka mengadakan pertemuan tiga kali dalam setahun. Dalam pertemuannya mereka mengambil keputusan tentang kebijakan ILO, menetapkan program juga anggaran yang kemudian diserahkan kepada konferensi untuk diadopsi.
* Tugas Badan Pimpinan dan Kantor dibantu oleh komite tripartit yang mencakup industri-industri besar. Hal ini juga didukung oleh komite ahli dalam pelatihan kejuruan, pengembangan manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industrial, pendidikan pekerja, dan masalah khusus perempuan dan pekerja usia muda.
* Pertemuan regional negara-negara anggota ILO diadakan secara berkala untuk mengkaji hal-hal yang menjadi perhatian khusus bagi anggota.

Standar yang ditetapkan ILO memiliki sistem pengawasan yang unik di tingkat internasional yang membantu memastikan bahwa negara-negara menerapkan konvensi yang mereka ratifikasi. Secara teratur, ILO memeriksa penerapan yang dilakukan negara-negara anggota, dan mengusulkan anggota mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh anggota.

### **Keamanan Manusia**

Dalam laporan *United Nations Development Programme* tahun 1994, definisi dari keamanan manusia adalah:

1) Keamanan dari ancaman serius seperti kelaparan, penyakit dan diskriminasi.

2) Perlindungan dari gangguan tidak terduga dan menyakitkan dalam jangka waktu berkesinambungan– baik dalam pekerjaan, di rumah atau di masyarakat.

Kofi Annan, dalam Laporannya tahun 2000 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, *We the People*, memberikan deskripsinya mengenai keamanan manusia: dalam arti luas, keamanan manusia mencakup hal yang lebih banyak dari sekedar menghapus konflik kekerasan. Konsep ini mencakup hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, akses pendidikan dan perawatan kesehatan memadai, juga memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan kebebasan untuk memenuhi potensinya. Hal ini juga berkesinambungan dengan langkah mengurangi kemiskinan, mencapai pertumbuhan ekonomi, dan mencegah konflik. Mencapai kebebasan dari kekurangan, mencapai pertumbuhan ekonomi dan mencegah konflik, dan kebebasan bagi generasi mendatang.

Emma Rothschild menjelaskan mengenai keamanan yang lebih kontemporer dan lebih luas dalam empat arah:

1. dari keamanan negara ke keamanan kelompok dan individu, diperluas ke bawah dari negara ke individu.
2. keamanan bangsa-bangsa ke keamanan sistem internasional, diperluas ke atas, dari bangsa ke biosfer.
3. diperpanjang secara horizontal, atau ke jenis keamanan yang dipertanyakan–entitas yang berbeda (seperti individu, negara, dan sistem) tidak dapat disamaratakan aman atau tidak amannya dengan cara yang sama–konsep keamanan diperluas, dari militer ke keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan manusia.
4. tanggung jawab politik untuk menjamin keamanan maupun pengawasannya perlu diperluas, menyebar ke segala arah dari negara-negara nasional, termasuk ke atas ke lembaga-lembaga internasional, ke bawah ke pemerintah regional atau lokal, dan ke samping ke organisasi non-pemerintah, publik media, termasuk juga kekuatan abstrak dari alam atau pasar.

Bagaimana menentukan dasar epistemologis konsep keamanan manusia? yang paling logis adalah menciptakan konsensus antar Lembaga terkait, mengingat bahwa setiap operasi keamanan manusia akan melibatkan konsensus kerja sama dari berbagai Lembaga. Cara lain untuk mengkonseptualisasi keamanan manusia adalah dengan memberi konteks yang jelas bagi jenis-jenis ancaman yang tanggapannya harus dikembangkan. Dalam kasus ini, unsur-unsur keamanan manusia akan dirinci sebagai ancaman resesi, agresi, degradasi tanah, polusi, terorisme, dan lain-lain yang cukup besar untuk memenuhi syarat sebagai ancaman keamanan. Ullman, dalam artikelnya memaparkan bagaimana keamanan harus didefinisikan kembali sebagai rangkaian peristiwa yang:

(1) mengancam dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk menurunkan kualitas hidup penduduk suatu negara. Atau,

(2) secara signifikan mengancam untuk mempersempit rentang pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah negara bagian atau swasta, entitas non-pemerintah (orang, kelompok, perusahaan) di dalam negara.

Ullman berpendapat bahwa selain ancaman militer, peristiwa seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan migrasi harus dianggap sebagai ancaman keamanan baru karena sesuai dengan definisinya. Para penstudi yang mendalami tentang keamanan manusia juga seringkali tampak tertarik membahas jenis-jenis keamanan baru seperti di atas.

### **Peran**

Definisi peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis dari sebuah kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) dijelaskan bahwa peran merupakan pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Demikian yang dimaksud perangkat peran adalah kelengkapan dari ikatan dan interaksi berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus.

Secara lebih rinci, dalam buku “*Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*” (Biddle, 1979), peran terasosiasi dengan posisi sosial (status). Secara umum, posisi sosial adalah identitas yang menunjukkan sekelompok orang yang diakui secara umum. Konsep peran juga digunakan sebagai media untuk membahas sosialisasi dan penyesuaian individu. Sehubungan dengan hal itu, peran dapat dianggap sebagai identitas, seperangkat perilaku, atau karakteristik, juga harapan. Teori peran didasarkan pada beberapa proposisi yang mendasari yang ada kesepakatan umum, diantaranya:

1. Teori peran menegaskan bahwa "beberapa" perilaku berpola dan karakteristik orang dengan konteks merupakan bentuk dari peran.
2. Peran sering dikaitkan dengan sekumpulan orang yang memiliki identitas yang serupa.
3. Orang sering menyadari peran, hingga sampai batas tertentu, peran diatur oleh fakta yang mereka sadari dan pahami.
4. Peran bertahan, sebagian karena konsekuensi (fungsi) atau karena mereka berada di bawah sistem sosial yang lebih besar.
5. Orang harus diajari tentang peran (sosialisasi) dan mungkin menemukan dampak positif maupun negatif dalam prosesnya.

Dalam kegunaan praktis saat ini, peran seringkali dilakukan oleh aktor dalam sebuah panggung, atau fungsi yang diambil oleh orang atau struktur. Sedangkan dalam ilmu sosial, istilah peran berarti karakteristik repertoar seseorang atau suatu posisi—seperangkat standar, deskripsi, norma, atau konsep yang dipegang untuk perilaku seseorang atau posisi sosial.

Teori peran juga merupakan perhatian bagi ilmu sosial di luar Batasan antropologi, psikologi, dan sosiologi. Konsep peran telah digunakan untuk mempelajari institusi politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Teori peran dapat berkontribusi pada disiplin ini dengan memberi tahu kita tentang karakteristik perilaku orang-orang di pasar, bilik suara, pengadilan, dan peristiwa yang menyangkut ekonomi maupun politik.

1. **Peran ILO**

Sejak 1950-an, ILO telah memberikan bantuan secara teknis kepada negara-negara yang tercakup di seluruh benua, dan di berbagai lapisan tahap ekonomi. Program dilaksanakan melalui kerjasama yang erat antara negara penerima, donor, dan ILO. Dalam menangani isu pekerja anak, salah satunya pada tahun 1992 ILO membuat program Bernama, “International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)” yang dibentuk pada tahun 1992 dengan tujuan utama yaitu menghapus pekerja anak, yang dicapai melalui upaya untuk meningkatkan kapasitas negara agar bisa mengatasi permasalahan yang ada sekaligus mempromosikan gerakan global untuk melawan adanya pekerja anak. Terhitung saat ini IPEC memiliki program di 88 negara, menjadikan program ini sebagai program mandiri terbesar dari ILO.

1. **Strategi ILO dalam Mengatasi Eksploitasi Buruh Anak**

Dalam melaksanakan upaya untuk mengatasi eksploitasi pekerja anak, ILO Merencanakan dan melaksanakan berbagai strategi dan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk menghapuskan berbagai bentuk pekerja anak di mana tujuan dari kebanyakan kebijakannya adalah untuk membuat perubahan yang berarti dalam kehidupan anak-anak dengan menarik mereka dari segala bentuk pekerjaan untuk anak termasuk pekerjaan berbahaya dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Bentuk-bentuk strategi ILO tertuang dalam kebijakan dan kerjasama *National Plan of Action to Eliminate Child Labour, International Programme on the Elimination of Child Labour and Forced Labour (IPEC), Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour Project, Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh, Developing a National Employment Injury Insurance (EII) Scheme for the Bangladesh Ready-Made Garment Sector.*

### **Pekerja Anak**

Pekerja anak merupakan mereka yang termasuk kedalam golongan usia terlalu muda untuk bekerja, atau menurut sifat maupun keadaannya, cenderung membahayakan keselamatan, kesehatan, atau moral anak. Dalam istilah yang lebih teknis, pekerja anak mencakup seluruh jenis pekerjaan, dengan dua pengecualian yaitu: pekerjaan ringan yang diizinkan untuk anak-anak dalam rentang usia yang ditentukan untuk pekerjaan ringan; dan pekerjaan yang tidak diklasifikasikan sebagai bentuk pekerjaan terburuk pada anak.

Definisi statistik secara lebih luas mencakup penjelasan mengenai pekerja anak dari sektor rumah tangga, pekerjaan yang mencakup segala bentuk produksi pasar dan jenis produksi non-pasar tertentu (terutama barang-barang seperti hasil pertanian). Pekerjaan mencakup pekerjaan baik di perekonomian formal maupun informal, di dalam dan di luar lingkungan keluarga, untuk mendapatkan bayaran atau keuntungan (tunai atau barang, paruh waktu atau penuh waktu) dan pekerjaan rumah tangga di luar rumah tangga anak itu sendiri untuk majikan (dibayar atau belum dibayar). Konsep pekerjaan ringan yang diizinkan berasal dari pasal 7 Konvensi ILO No. 138, yang menyatakan bahwa undang-undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan anak- anak dalam pekerjaan ringan yang tidak membahayakan kesehatan mereka pekerjaan ini juga tidak boleh menghambat proses belajar, partisipasi dalam orientasi kejuruan atau program pelatihan, dan akses untuk kepada keluarga.

1. **Pekerja Anak di Bangladesh**

Penyebab pertama dan utama pekerja anak di Bangladesh adalah kemiskinan ekonomi. Keluarga miskin tidak mampu membayar pendidikan karena faktor kemiskinan. Sejalan dengan ini, orang tua atau wali merasa enggan menyekolahkan anaknya. Orang tua menganggap anak-anak mereka lebih baik untuk membantu profesi mereka atau melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan keluarga.

Selain faktor keuangan, sifat ontogenetik orang tua seperti buta huruf, kondisi pengangguran (Webbink et al. 2013), karakteristik rumah tangga (sumber daya dan struktural). Studi metodis lain mengidentifikasi bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan dimana kekerasan dalam rumah tangga, perpisahan keluarga, dan ikatan keluarga yang buruk banyak terjadi, sangat rentan bagi anak untuk berpartisipasi dalam pekerja anak. Selain itu, beban hutang orang tua dapat mengakibatkan anak-anak dipaksa menjadi pekerja paksa (Basu dan Chau 2004), meskipun hal ini sangat dilarang di banyak negara. Masing-masing penyebab ini berkorelasi (Patrinos dan Psacharapoulos 1997).

1. **Eksploitasi Pekerja Anak di Bangladesh**

Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Biro Statistik Bangladesh dan ILO pada tahun 2015, memperkirakan bahwa ada 3,5 juta anak berusia 5-17 tahun yang bekerja di Bangladesh. Sebanyak 1,2 juta anak diperkirakan terjebak dalam bentuk-bentuk terburuk untuk pekerja anak.. departemen tenaga kerja AS memaparkan bahwa sebagian besar anak bekerja di sektor pertanian (45,5%) diikuti oleh sektor jasa (36%) dan sektor industri (18,5%). Pada tahun 2019, menurut data yang dilansir Borgen Project, diperkirakan sebanyak 4,3 persen anak-anak (usia 5-14) tahun di Bangladesh masih terlibat dalam pekerjaan yang eksploitatif.

**Tabel 1: Angka eksploitasi pekerja rumah tangga.**

| Tahun | Mati | Terluka | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 37 | 34 | 71 |
| 2010 | 56 | 30 | 83 |
| 2011 | 38 | 20 | 58 |

(Sumber: Institut Studi Ketenagakerjaan Bangladesh)

Laporan alternatif CRC 2013 dari Bangladesh menyoroti bahwa dari 23 insiden, 22 menggambarkan bentuk penyitaan yang berat terhadap pekerja rumah tangga. Analisis laporan menunjukkan bahwa pekerja anak disiksa atas alasan yang sepele, seperti tidak melakukan tugas dengan benar, menunda pekerjaan, atau hanya memecahkan kaca. Penyiksaan yang sebenar-benarnya mulai dari pemukulan, tamparan, tendangan, pukulan, dicabut rambutnya atau disapa dengan bahasa kasar dan cabul, pemukulan kepala ke tembok, dibakar dengan rokok atau benda logam lainnya, tidak dibayar gaji dan pemerkosaan. Banyak pekerja anak di Bangladesh juga merupakan korban dari perdagangan untuk eksploitasi seksual komersial di negara-negara tetangga seperti India dan Pakistan. Anak-anak Bangladesh juga diperdagangkan di dalam negeri untuk pekerjaan kasar pekerjaan rumah tangga. Konsentrasi pekerja anak tertinggi ditemukan di Provinsi Dhaka dimana diperkirakan sebanyak 690.000 anak terlibat dalam pekerja anak.

## **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian pada penelitian adalah jawaban sementara dari pernyataan penulis yang selanjutnya masih perlu diuji kebenaran dan keabsahannya berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan kepada kerangka teoritis di atas, maka bentuk hipotesis yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

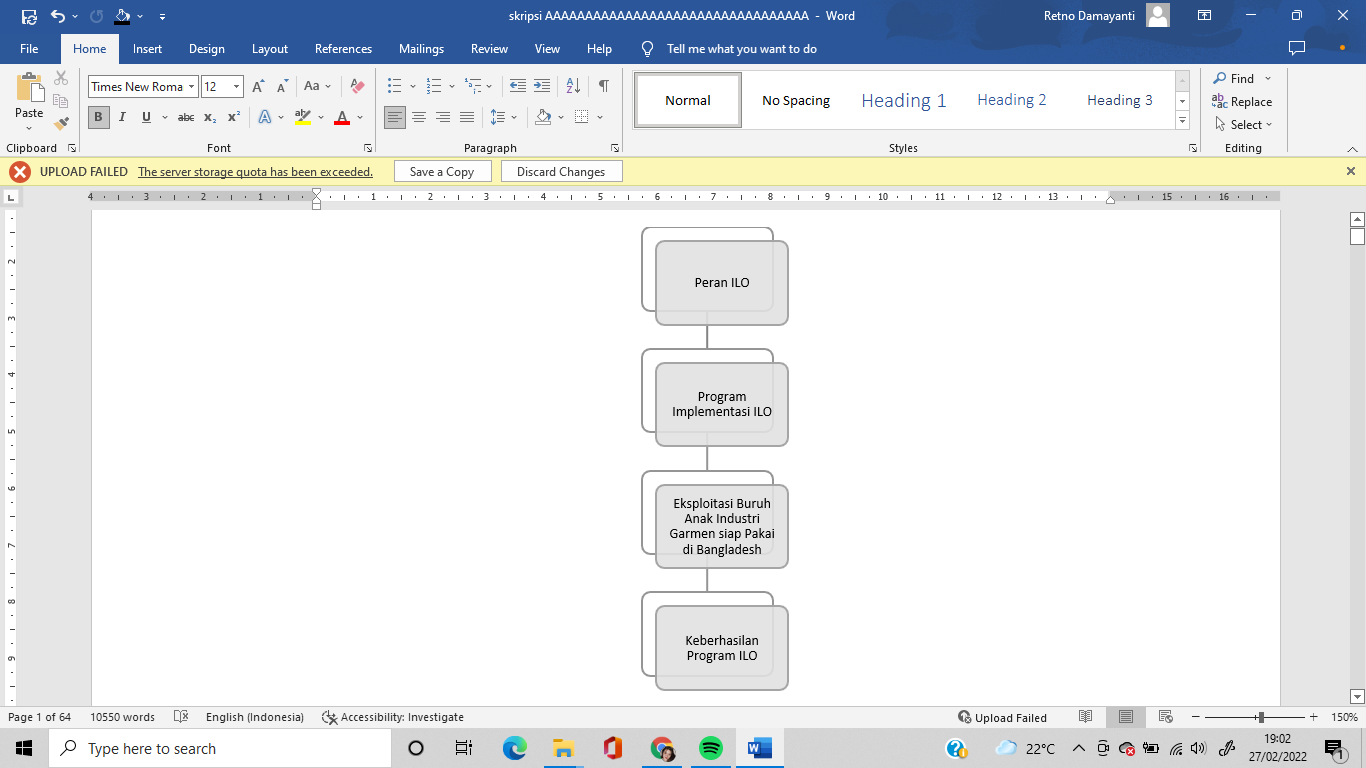
**“Adanya peran aktif ILO dalam mengatasi eksploitasi pekerja anak dalam sektor industri garmen siap pakai di Bangladesh.”**

## **Verifikasi Variabel dan Indikator**

**Tabel 2: Verifikasi Variabel dan Indikator**

| **Variabel dalam Hipotesis**  **(Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| --- | --- | --- |
| -Variabel Bebas: *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi yang sebuah organisasi yang menyuarakan hak-hak para pekerja, mendorong dan menciptakan kesempatan kerja yang layak, serta meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialog tentang isu-isu yang terkait dengan pekerja termasuk masalah eksploitasi pekerja anak industri garmen siap pakai di Bangladesh | - ILO sebagai organisasi internasional dianggap dapat berperan mengatasi masalah eksploitasi anak dalam sektor industri garmen siap pakai di Bangladesh.   * - ILO meningkatlam kemampuan para pekerja anak dengan pelatihan kejuruan dan akses kepada Pendidikan, yang juga mempengaruhi perkembangan ekonomi negara melalaui IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*) | * IPEC telah bekerja dengan organisasi pengusaha dan pekerja, organisasi penelitian dan akademisi, aktor masyarakat sipil serta berbagai NGO untuk melaksanakan berbagai proyek dan kegiatan. Sekitar 75.000 pekerja anak mendapat manfaat langsung dari intervensi ini. Sebagai hasil dari advokasi yang berkelanjutan, Pemerintah Bangladesh meratifikasi Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No.182) pada 12 Maret 2001. Undang-undang nasional tentang pekerja anak yang berbahaya kemudian direvisi pada tahun 2006 dan daftar peraturan berbahaya bentuk-bentuk pekerja anak diadopsi pada tahun 2013. * Inisiatif ILO-IPEC telah memberikan kontribusi *National Child Labour Policy  and the national plan of action to implement the policy*. * Serta menciptakan program kerjasama seperti CLEAR *(Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour*) (https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/child-labour/lang--en/) |
| -Variabel Terikat: Maka pemenuhan hak para pekerja anak industri garmen siap pakai yang terkena eksploitasi dapat terpenuhi. | * - Dengan adanya kerjasama ILO sebagai organisasi tripartit dengan organisasi pengusaha, lembaga internasional dan pemerintah, pihak swasta, NGO, serta pihak terkait lainnya masalah eksploitasi pekerja anak industri garmen siap pakai di Bangladesh | * Kebijakan *National Child Labour Elimination Policy dan program National Plan of Action* (NPA) memiliki fokus tujuan untuk melahirkan kembali hak-hak pekerja anak yang hilang seperti, akses terhadap edukasi, kesehatan, reunifikasi dengan keluarga, upaya penyediaan fasilitas kerja yang lebih baik, dibuat melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah lokal termasuk *non-governmental organization*. IPEC memiliki program *Country Level of Engagement and Assistance to Reduce Child Labour* (CLEAR) di mana kebijakannya mengacu dari *National Child Labour Elimination Policy* dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan, Organisasi Pengusaha, Organisasi Pekerja dan NGO. (https://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/lang--en/) |

## **Skema dan Alur Penelitian**



# 